

# PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG TOLERANSI BERAGAMA

SUWARDIYAMSYAH

Dosen STIT Ar-Raudhah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang  
Provinsi Sumatera Utara, E-mail: [suardiyamsyah@gmail.com](mailto:suardiyamsyah@gmail.com)

## **Abstract:**

*The idea of tolerance Abdurrahman Wahid is the subject of study in this study, is a reflection on the process of dialogue became a Muslim and a true citizen. This research is a documentary research that uses methods of critical analysis. The main data used in this thesis is related to the theme of the books in question, either written by themselves and others who write about Abdurrahman Wahid. Theoretical base that is used to analyze the theory of tolerance. There are two conclusions derived from the analysis of the data in this study; first, thinking Abdurrahman Wahid of tolerance is more focused on how the attitudes and actions of individuals in interaction in a pluralistic society is religious, he considers that tolerance is a necessity in the life of a cosmopolitan that tolerance should be owned by those who want the order of life be calm, and peaceful because tolerance is respect, this basis begins with the acceptance of pluralism in acting and thinking. Second, the influence of the ideas Abdurrahman Wahid gave a very significant impact on the lives of religion, nation and state, it can be seen from the successes of Abdurrahman Wahid completed several real issue is very sensitive, such as the handling of terrorism cases, the Ahmadiyah case is addressed in a lighter, freedom of the Tionghioa with the launch of Confucian Religion, Religious Pluralism rapidly growing and its influence in the world of practical politics and the state.*

**Keyword:** Thought, Abdurrahman Wahid, religious tolerance

## **PENDAHULUAN**

Gus Dur atau K.H. Abdurrahman Wahid adalah salah seorang cendekiawan muslim yang sangat menonjol dan tersohor namanya. Gus Dur bukan hanya tumbuh sebagai seorang anak kyai semata, tetapi Gus Dur tumbuh sebagai seorang tokoh kharismatik bagi kalangan Nahdhiyyin yang cukup disegani. Sudah lebih dari 15 tahun Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), yaitu sebuah organisasi kaum tradisionalis “warisan” kakeknya, Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari. Gagasan-gagasan Gus Dur selalu dilandasi kepada argumentasi yang senantiasa didasarkan kepada teori sosial modern dan prinsip-prinsip politik Islam. Hal tersebut menunjukkan kepaiawaian Gus Dur dalam berkomunikasi dengan berbagai lapisan politik publik dan kedalaman pemahamannya terhadap berbagai lapisan masyarakat yang dihadapinya.

Salah satu ciri gaya Gus Dur yang diketahui adalah keinginannya untuk selalu

mencari dataran-dataran baru yang bisa menjadi titik temu bagi berbagai perbedaan (Parera, 1999: 165), seperti wacana pluralisme dan toleransi. Dapat dikatakan bahwa Gus Dur sebagai tokoh Islam memiliki paradigma sendiri dalam memahami konsep toleransi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kaitan itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Toleransi Beragama.

## **PEMBAHASAN**

Pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah memberikan warna tersendiri dalam dinamika intelektual muslim di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, ia ditempatkan sebagai intelektual muslim progresive, kritis, bahkan terkesan paradoks, inkonsisten, banyak mengundang kontroversi, namun menjadi inspirator bagi banyak intelektual muda, terutama NU.

Pemikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid bukan muncul dalam ruang kosong, tetapi terlahir dan dibesarkan dari proses dialektik dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Proses dialektik ini dilalui dengan tiga proses yang saling berkesinambungan. Pertama, eksternalisasi berupa ekspresi diri ke dalam dunia, di mana manusia berusaha menemukan dirinya dalam suatu dunia. Kedua, objektivasi, yakni suatu proses yang menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Ketiga, internalisasi, berupa penyerapan kembali dunia objektif dalam kesadaran sehingga subjektifitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Berger, 1991: 4-5).

Abdurrahman Wahid lahir dari keluarga dengan campuran darah biru, kalangan priyayi, dan juga ulama besar di Jawa. Dilihat dari silsilahnya, Gus Dur mewarisi semangat pendahulunya, K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) dan ayahnya yang juga tokoh NU dan pahlawan Nasional. Abdurrahman Wahid menjalani proses penggemblengan intelektual dan pengembaraan intelektual yang panjang. Dalam tradisi pesantren ini Gus Dur terbentuk sebagai sosok dengan jejaring yang cukup unik antara Kyai dan Santri. Setelah lulus dari Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta pada tahun 1953, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Yogyakarta pada tahun 1953-1957

Mohandas Karamchand Ghandi. Hamzah dan Anam, 1999: 11). Selama menempuh pendidikan di Yogyakarta ini ia tinggal di rumah salah seorang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, KH. Junaid. Selanjutnya pada tahun 1957-1959 ia belajar di Pesantren Tegalrejo Magelang dan kemudian pindah ke Pesantren Mu'allimat Bahrul Ulum, Jombang, sampai tahun 1963. Setelah itu ia kembali belajar di Yogyakarta (Pesantren Krapyak) dan tinggal di rumah KH. Ali Maksum, tokoh NU terkemuka kala itu. Dari pesantren Krapyak ini, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Al- Azhar, Kairo (Mesir) (Masdar, 1999: 119) untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam dan Sastra Arab dan kemudian pindah ke Fakultas Sastra Universitas Baghdad (Saefullah, 2003: 67).

Latar belakang pendidikan dan pengalaman Abdurrahman Wahid dengan wacana-wacana kritis telah membuat dirinya siap berhadapan dengan dinamika sosial, politik, serta dan wacana ke Islaman kontemporer. ia juga menggeluti kegiatan politik yang diawali dengan keterlibatannya dalam dunia lembaga swadaya masyarakat. Pemikiran Abdurrahman Wahid lahir ditengah era developmentalisme dalam kekuasaan Orde Baru yang bercorak kompromistik antara varian ekonomi dan politik yang menyatu dalam agenda besar modernisasi.

Abdurrahman Wahid banyak meninggalkan karya intelektual sebagai respon atas situasi yang ada pada waktu itu. Selain dalam bentuk buku, karya lain yang paling banyak ditinggalkan adalah dalam bentuk artikel, opini, atau esai. Pemikirannya tentang tentang persoalan-persoalan sosial dan gerakan sosial di luar pesantren baru dimunculkannya setelah berjumpa dengan intelektual lain dan aktivis sosial pada era tahun 1980-an. Dalam buku *Muslim di Tengah Pergumulan*, karya Abdurrahman Wahid ini mulai merambah pada modernisasi, HAM (Hak Asasi Manusia), demokrasi, dan reinterpretasi ajaran Islam (Wahid, 1981: 67). Sedangkan era 1990-an, pemikiran Abdurrahman Wahid secara umum bersentuhan dengan persoalan humanisme, kepartaian, dan demokrasi. Toleransi merupakan istilah populer yang selalu dilekatkan dengan kondisi masyarakat yang plural. Secara kebahasaan, kata toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti bertahan tau memikul. Toleran disini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain,

walaupun kedua belah pihak tidak sependapat (Siagian, 1993: 115).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah toleransi berarti sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiasakan, membolehkan) pendirian, pendapat, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya, yang berbeda dengan pendiriannya sendiri (Anonymous, 1989: 955). Toleransi juga bermakna pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing. Pemberian kebebasan itu dilakukan selama ia tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan azas terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat Hasyim, 1978: 22).

Dalam bahasa Arab, toleransi disepadankan dengan kata tasamuh yang berarti membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat diartikan sebagai maksud agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat atas pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak yang sama dalam mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal antara satu sama lain. Ada pula yang mengartikan tasamuh sebagai kesabaran hati dan membiarkan selama tidak merusak bingkai keimanan (Musthofa, et al, 1997: 57). Apabila diambil dari bahasa Inggris "tolerance", mengandung makna "sikap jujur dan objektif terhadap orang lain yang berbeda pandangan, tingkah laku, ras, agama, serta bebas dari prasangka dan fanatis" (Webster, 1980: 1919).

Sedangkan Abdurrahman Wahid menempatkan toleransi dalam bertindak dan berfikir, sikap toleransi tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan, tetapi persoalan hati dan perilaku. Orang yang bersikap toleran tidak mesti memiliki kekayaan, bahkan semangat toleransi justru sering dimiliki oleh orang yang tidak pintar, tidak kaya, yang biasanya disebut "orang-orang terbaik (Abas, 1997: 16).

Sejak kedatangan Nabi Muhammad saw. ke Yatsrib, maka seketika itu juga berubahlah nama kota Yatsrib menjadi Madinnatun Nabawi artinya kota nabi, selanjutnya disebut Madinah. Kemajemukan komunitas Madinah membuat rasul melakukan negosiasi dan konsolidasi melalui perjanjian tertulis yang

terkenal dengan “Piagam Madinah”. Berawal dari Piagam Madinah inilah sesungguhnya merupakan rangkaian penting dari proses berdirinya Negara Madinah (Hasjmi, 1978: 24).

Sejak itu dimulailah babak baru dalam masa kenabian. Secara sosial masyarakat, Madinah ketika itu terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok - kelompok yang tergolong besar dan berpengaruh adalah kelompok Yahudi dan Arab. Kelompok Arab sendiri terdiri dari suku “Aus dan Khozroj”.

Sisi menarik dari sistem politik yang dibangun oleh Nabi adalah bahwa dalam Negara Madinah itu dibangun dengan kondisi sosial penduduknya yang heterogen. Etnis Arab dengan beraneka suku, dan juga berbagai jenis keyakinan, Yahudi dengan beberapa sekte, Nasrani serta masyarakat suku paganisme yang belum mempunyai agama, serta Islam sendiri. Rasulullah telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan keturunan. Dalam memperkuat rasa persaudaraan ini, Allah swt. berfirman dalam alqur’an surat Al-Hasyr: 9 yang artinya: ”Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. ” Kemudian hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan Nabi Muhammad saw. mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang yahudi (Haikal, 199: 199-205).

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan toleransi beragama dalam masyarakat majemuk. Bagi Wahid, toleransi bukan persoalan epistemologi sehingga membutuhkan definisi, tetapi aksiologi dari konsep-konsep yang bersifat normative dalam Islam. Ia hadir bersamaan dengan topik pembahasan pluralisme. Jika pluralisme membicarakan

soal bagaimana realitas kemajemukan agama dapat diterima, maka toleransi adalah lebih menekankan bagaimana berperilaku dalam kemajemukan tersebut. Toleransi menurut Abdurrahman Wahid sesungguhnya bukanlah gagasan yang berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan dimensi sosial dalam frame besar kehidupan berbangsa. Secara teoritik, toleransi dalam pemikiran Abdurrahman Wahid ini juga bukan pemikiran yang terpisah dengan dimensi keagamaan (ulumuddin), tetapi merupakan proses dialogis antara keilmuan Islam (ulumuddin) dengan keilmuan humaniora yang menghasilkan sikap dan tindakan toleran sebagai aksiologinya.

Sebagai seorang muslim, gagasan toleransi Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari dimensi normatif dalam Islam yang tertuang dalam ayat berikut: (Haikal, 199: 199- 205). “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1990: 832).

Bagi Abdurrahman Wahid, kata rahmatan lil ‘alamin dalam ayat ini bukan sekedar mengandung arti sebagai umat manusia semata, lebih jauh lagi ia memahaminya sebagai semua makhluk yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, Islam dalam pandangannya adalah sebagai pelindung semua makhluk (Wahid, 2006: 76). Konteks perlindungan sebagaimana dimaksud oleh Abdurrahman Wahid di atas, bukan dalam kerangka perbandingan mayoritas-minoritas ataupun kuat-lemah, melainkan sebuah tanggung jawab yang mengarah pada terbentuknya suatu ikatan persaudaraan. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi “irhamu man fil ardhi yarhamukum man fil sama” (sayangilah orang yang ada di bumi maka akan sayang pula mereka yang ada di langit kepadamu). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami’ no. 3522). Hadis ini memberikan makna tentang persaudaraan universal yang dapat dicapai dengan sikap dan perilaku toleran. Selain itu, toleransi sebagai sikap dan tindakan juga tidak terlepas dari pemaknaan ayat sebagaimana berikut: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

(Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1990: 63).

Oleh karenanya, toleransi bagi Abdurrahman Wahid bukan sekedar menghormati atau tenggang rasa, tetapi harus diwujudkan pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan diteruskan dengan saling memiliki (sense of bilonging) dalam kehidupan menjadi “ukhuwah basyariyah”. (Wahid, 1981: 173). Terkait dengan kehidupan berbangsa, ia menegaskan bahwa kewajiban muslim sebagai pemeluk mayoritas adalah menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Wahid, 1981: 173).

Toleransi dalam pemikiran Abdurrahman Wahid tampak memberikan artikulasi dari sebuah relasi yang bersifat aktif dalam kerangka besar kehidupan berbangsa. Dalam konteks yang demikian, toleransi Abdurrahman Wahid ini lebih tepat disebut sebagai toleransi beragama yang berkebangsaan. Artinya, selain membangun relasi aktif dalam responnya terhadap agama lain, juga harus mengarah pada bagaimana terciptanya kehidupan damai, setara, dan berkeadilan dalam kehidupan berbangsa.

Toleransi juga tidak tergantung pada kepemilikan materi, sebab toleransi justru sering ditemukan pada orang-orang yang tidak “pintar” maupun kaya (Abas, 1997: 37). Dengan kata lain, toleransi beragama sebagaimana yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid bukan saja mengarah pada penghormatan dan pengakuan, tetapi juga penerimaan atas perbedaan agama dan status sosial. Ruang implementasi inilah yang menjadi titik tekan dari pemikiran Abdurrahman Wahid tentang toleransi.

Berkaitan dengan pengaruhnya di Indonesia, Abdurrahman Wahid adalah sosok yang cukup dipertimbangkan dalam hal mensosialisasikan ide pluralisme agama. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dan tak kalah kontroversialnya berkenaan dengan segala bentuk aksi dan pemikirannya. Ia menjadi pondasi pelindung atas berbagai ketidakadilan setidaknya begitulah anggapan banyak orang yang pernah mengenal sosok Gus Dur atas kiprah dan perjuangannya membela hak minoritas dan berbagai ketimpangan social lainnya di negeri ini (Barton, 2008: 243-244).

Berkenaan dengan ide pluralisme agama, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya pada saat pemakaman almarhum Gus Dur mengatakan bahwa Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Indonesia. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tak mungkin disamakan. Dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 99 Allah berfirman: "Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1990: 322).

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang toleransi agama tidak hanya menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi juga menekankan pada penggunaan metodologi (manhaj), teori hukum (ushul fiqh), dan kaidah-kaidah hukum (Qawa'id Fiqhiyah) dalam kerangka pembuatan suatu sintesa untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual di masyarakat sehingga konflik antar agama bisa terhindari. Dengan demikian pengaruh pemikiran toleransi Abdurrahman Wahid yang terlihat dalam konteks keindonesiaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persoalan Terorisme di Indonesia;
2. Kasus Ahmadiyah;
3. Mencap kafir kelompok Nasrani dan Yahudi;
4. Masalah pengharaman mengucapkan selamat hari Natal;
5. Mengecam keras acara megah Sidang Raya Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI, sekarang PGI) di Manado tahun 1980;
6. Pembebasan masyarakat keturunan Tionghoa (<http://id.wikipedia.org>).

Dalam bidang politik, bagi Gus Dur, demokrasi berarti persamaan hak dan status dari setiap warga Negara di depan hukum, tanpa melihat perbedaan etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa (Wahid, 1994: 272). Gus Dur ingin menegaskan bahwa dengan demokrasi setiap agama diberikan hak dan posisi yang sama untuk berkarya dan mengeluarkan pendapat dalam menyelesaikan persoalan bersama. Menurut Gus Dur, keadilan adalah sangat penting dalam mendukung kehidupan sosial dan politik yang harmonis sehingga tidak ada pembedaan dan klasifikasi



sosial serta kesenjangan sosial yang dapat berakibat pada terjadinya ketegangan dan bermuara pada konflik.

Gus Dur senantiasa mengatakan bahwa kita harus selalu berpikiran positif terhadap orang lain, yang berbeda dengan kita. Hal ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang baik untuk mengentaskan dan membicarakan masalah- masalah bersama. Demokrasi dalam hal ini adalah jaminan bagi setiap agama-agama mendapatkan tempat yang sama.

Gus Dur sangat anti terhadap sikap membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain, karena sikap ini justru akan melemahkan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal kita hidup di era masyarakat yang pluralistik. Nilai-nilai pluralisme akan tetap terjamin dalam alam masyarakat demokratis dan semangat jiwa pluralisme akan menjadikan bangsa ini kaya dan kuat.

Toleransi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa menjadi kebutuhan mendasar agar dapat mencapai kehidupan yang harmonis di tengah pluralitas agama. Sejak lama Indonesia dikenal negara yang plural baik dari segi agama, budaya maupun politik. Hildred Geertz dalam Ismail menggambarkan bahwa Indonesia dihuni lebih dari tiga ratus kelompok etnis dengan identitas kebudayaannya masing-masing, ragam bahasa yang mencapai lebih dari dua ratus bahasa, keterwakilan agama-agama besar, serta agama asli yang jumlahnya teramat banyak (Ismail, 1997: 371-372).

Dalam konteks yang demikian, toleransi menjadi kebutuhan mendasar yang harus dibangun agar kehidupan berbangsa tidak mengarah pada disintegrasi. Terkait dengan hal ini, konsep toleransi Abdurrahman Wahid yang mendialogkan antar ilmu keislaman, ideologi negara, dan realitas kemajemukan menemukan relevansinya pada tiga gugus kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus.

Pertama, toleransi beragama Abdurrahman Wahid memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kehidupan beragama yang inklusif. Dalam hal ini, agama sebagai bagian dari hak dasar kehidupan manusia acapkali dihidupkan dengan cara pandang eksklusif dan bahkan radikal yang justru mendangkalkan makna agama.

Kedua, Pancasila sebagai ideologis negara merupakan sumber hukum yang harus netral dari pengaruh kelompok agama manapun. Munculnya perda-perda Syari'at di berbagai wilayah di Indonesia merupakan bukti bagaimana peranan Pancasila ini telah "terkooptasi" oleh bayang-bayang kekuatan agama.

Ketiga, toleransi beragama Abdurrahman Wahid yang bukan saja berada pada ruang penghormatan dan pengakuan, tetapi juga upaya untuk menumbuhkan rasa saling memiliki dapat dibaca sebagai tanggung jawab dari masing-masing pemeluk agama untuk mempertahankan dan memperkuat kemajemukan.

Gus Dur yang sering disebut sebagai cendekiawan muslim neomodernisme mengaitkan toleransi dengan ajaran universal dan kosmopolitanisme Islam, yang didasarkan pada adanya 5 (lima) jaminan dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Kelima jaminan dasar tersebut adalah Pertama, Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing.

Kedua, Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. Jaminan ini melandasi hubungan antar warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat-menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar.

Ketiga, Keselamatan keluarga dan keturunan. Keempat, Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Kelima, Keselamatan profesi. Jaminan dasar akan keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari universalitas ajaran Islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayangnya.

Dengan demikian, sikap intoleransi menurut Gus Dur adalah sikap yang menunjukkan sikap arogan dan merasa paling benar sendiri sehingga menafikan kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Hal ini mengindikasikan rendahnya kualitas iman seseorang. Semua makhluk apapun itu agamanya, rasnya, suku dan

pemikirannya adalah ciptaan Allah yang Maha Benar.

## **PENUTUP**

Pertama, Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang toleransi merupakan hasil dari proses dialogis antara keilmuan agama (ulumuddin), falsafah Pancasila, dan realitas sosial. Metode berfikir yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid tentang toleransi menggabungkan antara metode berfikir induktif dan deduktif. Karena itu, toleransi beragama dalam pandangannya lebih ditekankan pada persoalan aksiologi yang bersifat aktif. Konsep toleransi ini sangat terkait dengan pemikirannya tentang pluralisme dan demokrasi. Jika pluralisme adalah bagaimana kemajemukan agama itu diterima dan demokrasi adalah sistem kenegaraan yang mewadahi kemajemukan agama tersebut, maka toleransi beragama adalah bagaimana berinteraksi dalam kemajemukan agama. Toleransi beragama Abdurrahman Wahid lebih menekankan pada persoalan aksiologi dan penjagaan terhadap realitas kemajemukan.

Kedua, pemikiran Abdurrahman Wahid memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan toleransi beragama di Indonesia, lihat saja bagaimana atas beberapa pemikirannya baik dalam bidang keberagamaan, politik dan bernegara telah melahirkan pandangan yang berbeda bagi sebahagian besar rakyat Indonesia yang menjadikannya sebagai pondasi pelindung atas berbagai ketidakadilan. Ide pluralisme yang dikembangkannya, persoalan terorisme yang dianggapnya sebagai tindakan kaum radikal yang menyimpang, kasus Ahmadiyah yang dibela, tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal dan perayaan hari besar agama-agama lainnya, dan yang lebih fenomenal adalah pembebasan hak beragama warga Tionghoa dengan meresmikan agama Kong Hu Chu sebagai agama yang resmi di Indonesia, semua itu merupakan hasil dari pemikiran Gus Dur yang akhirnya berpengaruh sangat besar di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hasjmi, *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, Mutiara, Jakarta 1978.  
Abdurrahman Wahid, "Agama dan Demokrasi", dalam Th. Sumartana, dkk. ed.,  
Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat (Yogyakarta: Dian

Interfidei, 1994).

Abdurrahman Wahid, “*Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Abdurrahman Wahid, *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah* (Yogyakarta:LKiS,1997). Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lappenas, 1981).

Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lappenas, 1981).

Abu Bakar Aceh, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar ArisSaefullah, GusDur VS Amien Rais: Dakwah Kultural-Struktural* (Yogyakarta: Laelathinkers, 2003).

Douglas E. Ramage, *Demokrasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid, dalam Greg Berton dan Greg Fealy (ed), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: LkiS, 1997).

Faisal Ismail, *Islam dan Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Indonesia dalam Susetawan, dkk, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan* (Yogyakarta: UII Press, 1997).

Imron Hamzah dan Choirul Anam, (ed.),*Sebuah Dialog Mencari Kejelasan: Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*,(Surabaya: Jawa pos, 1999).

Kompas, No. 213 Tahun Ke-32, 31 Januari 1997.

Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad, Jakarta: Intermasa, 1992. Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute,

Muhammad Rifai, *Gus Dur:Biografi Singkat 1940-2009* (Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010), Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua (Yogyakarta: LKiS, 2002).

Musthofa, et al, *The Theological Frame of Harmonious Life of Religious Communities in Indonesia* (Jakarta: Departemen of religious Affairs, the Republic of Indonesia, 1997).

Noah Webster, *Webster New Twentieth Century Dictionary* (New York: William Collins Publisher Inc., 1980).

Peter L.Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Produk Sosial*. Terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991).

Siagian, *Agama-Agama di Indonesia*, (Semarang: Satya Wacana, 1993).

Umar hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978).

Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi Cet II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Yayasan *Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*,  
(Jakarta: Departemen Agama, 1990).

Zuly Qadir, *Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia Wacana dan Aksi Islam  
Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).